

OPTIMALISASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK TERPADU MELALUI KOMPILASI DATA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

AKHMAD FARHAN DEWANA
31.0298

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

email : akhmadf42@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Ir. H. Dwi Agus Sumarno, MM, M.Si

ABSTRACT

Background (GAP): Integrated tax administration systems play a crucial role in enhancing local financial management efficiency, particularly in the collection of specific goods and services taxes in Bandar Lampung City. Despite optimization efforts, there remains potential to improve its effectiveness, such as in local regulation enforcement, tax potential database updates, resource adjustments, and taxpayer education to enhance public service. **Objective:** This study aims to evaluate and identify inhibiting factors and efforts that the Bandar Lampung Local Government can undertake to enhance the effectiveness of integrated tax administration systems. **Method:** This research utilizes a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data analysis involves data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Findings:** Optimization of the integrated tax administration system through compilation of specific goods and services tax data in Bandar Lampung has proven beneficial in enhancing local financial management efficiency. Nevertheless, improvements are needed in local regulation enforcement, tax potential database updates, resource adjustments, and taxpayer education for optimizing public service. **Conclusion:** The Bandar Lampung Local Government is encouraged to continue efforts for improvement and enhancement in implementing integrated tax administration systems to maximize their contribution to local financial management.

Keywords: *Optimization, Integrated Tax Administration System, Specific Goods and Services Tax*

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Sistem administrasi pajak terpadu berperan penting dalam efisiensi pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam pemungutan pajak barang dan jasa tertentu di Kota Bandar Lampung. Meskipun telah dilakukan optimalisasi, masih terdapat potensi untuk meningkatkan efektivitasnya, seperti dalam penegakan peraturan daerah, pemutakhiran database potensi pajak, penyesuaian sumber daya, dan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan pelayanan publik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan efektivitas sistem administrasi pajak terpadu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Optimalisasi sistem administrasi pajak terpadu melalui kompilasi data pajak barang dan jasa tertentu di Kota Bandar Lampung telah terbukti berdampak positif dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, masih diperlukan perbaikan dalam aspek penegakan peraturan daerah, pemutakhiran database potensi pajak, penyesuaian sumber daya, dan sosialisasi kepada wajib pajak untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung diharapkan terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan dalam implementasi sistem administrasi pajak terpadu guna memaksimalkan kontribusinya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Sistem Administrasi Pajak Terpadu, Pajak Barang dan Jasa Tertentu*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Sebagai salah satu kota di Indonesia, Bandar Lampung memiliki peran strategis dalam mengelola potensi pajak daerah guna mendukung kebutuhan anggaran daerah secara mandiri. Hal ini penting mengingat perlunya mencari sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai program-program pembangunan serta menyediakan pelayanan dasar kepada warga.

Pada era desentralisasi fiskal yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pemerintah daerah seperti Kota Bandar Lampung diberikan kewenangan luas untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya sendiri. Salah satu instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan pendapatan adalah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah di Kota Bandar Lampung, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), menjadi sumber pendapatan yang signifikan.

Pengelolaan pajak daerah ini dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, yang bertanggung jawab atas pemungutan, pengelolaan, dan penyetoran pajak serta retribusi yang diterima dari wajib pajak. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah Kota Bandar Lampung mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk penerapan sistem self-assessment dalam perhitungan dan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak dan mengurangi birokrasi dalam proses perpajakan.

Meskipun demikian, realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah tidak selalu mencapai target yang ditetapkan. Contohnya, pada tahun anggaran 2021, Kota Bandar Lampung hanya mencapai 61,32% dari target pendapatan pajak daerah, sementara pada tahun anggaran 2022, realisasinya meningkat menjadi 95,92%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak daerah, termasuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.

Penerapan teknologi informasi, seperti Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) dan pemasangan tapping box sebagai alat perekam transaksi usaha, menjadi upaya nyata pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah. SAPT memungkinkan wajib pajak untuk melakukan berbagai transaksi perpajakan secara online, mulai dari pengisian SPT hingga pembayaran pajak, sehingga mempermudah proses administrasi bagi wajib pajak dan pemerintah daerah.

Namun, masalah seperti manipulasi data atau penghindaran pajak oleh sebagian wajib pajak tetap menjadi perhatian serius. Banyaknya kasus di mana wajib pajak tidak mematuhi ketentuan atau menggunakan cara-cara tertentu untuk mengurangi kewajiban perpajakannya menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif dari pihak berwenang.

Selain itu, pemutakhiran data objek pajak secara berkala juga menjadi krusial dalam memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki basis data yang akurat dan terpercaya untuk menetapkan besaran pajak yang sesuai. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi setempat, penting bagi pemerintah Kota Bandar Lampung untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan pajak daerah guna memaksimalkan pendapatan yang dapat dihasilkan.

Optimalisasi sistem administrasi pajak terpadu, melalui kompilasi data pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), diharapkan dapat memberikan solusi bagi Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Langkah-langkah strategis ini tidak hanya memperbaiki tata kelola pajak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pengusaha terhadap sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengelola pendapatan pajak daerah menjadi suatu prakarsa yang terus dikembangkan untuk mendukung visi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup warga Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi menjadi fokus utama Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik. Salah satu komponen penting dari strategi ini adalah sistem administrasi pajak terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Meskipun telah ada upaya optimalisasi, terdapat beberapa kesenjangan masalah yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Salah satu kesenjangan utama yang dihadapi adalah dalam penegakan peraturan daerah terkait perpajakan. Meskipun terdapat regulasi yang jelas, implementasinya tidak selalu konsisten. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemutakhiran data potensi pajak secara berkala menjadi krusial dalam menentukan besaran pajak yang seharusnya diterapkan. Tantangan terbesar adalah

dalam memastikan bahwa data yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah akurat dan terkini. Ketidakakuratan data dapat mengarah pada ketidakadilan dalam pemungutan pajak serta potensi kehilangan pendapatan bagi daerah.

Efektivitas sistem administrasi pajak tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Bandar Lampung perlu terus mengevaluasi dan menyesuaikan sumber daya ini agar mampu mendukung operasional pajak secara efisien. Ini meliputi pelatihan terhadap pegawai pajak dan investasi dalam teknologi informasi yang lebih canggih untuk mendukung pengelolaan data dan pelaporan yang lebih baik. Peningkatan partisipasi dan kepatuhan wajib pajak juga bergantung pada tingkat sosialisasi yang efektif. Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya dalam menyampaikan informasi mengenai kewajiban perpajakan serta manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dari kontribusi mereka. Sosialisasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Manipulasi data atau penghindaran pajak oleh sebagian wajib pajak masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani. Perlunya penegakan hukum yang ketat dan pengawasan yang lebih intensif dari pihak berwenang diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini akan mendukung integritas sistem perpajakan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penjelasan terkait penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Sistem Administrasi Pajak Terpadu Melalui Kompilasi Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu:

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Saputra et al., 2022): Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa meskipun pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan, pembebasan ganti nama kendaraan dan sosialisasi perpajakan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan Data Mining Menggunakan Metode Teknik Klasifikasi (Lestari et al., 2023): Penelitian ini menerapkan teknik data mining dengan algoritma Naïve Bayes untuk mengidentifikasi potensi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan. Hasilnya menunjukkan akurasi sebesar 70,91%, yang mengidentifikasi wajib pajak potensial yang patuh dan tidak patuh, berkontribusi pada pemahaman lebih dalam terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Efektivitas Program Walk Thru pada Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Rahmadi & Wahyuni, 2021): Penelitian ini fokus pada efektivitas program walk thru di Kantor Bersama Samsat Kota Probolinggo. Program ini berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan dengan mengurangi waktu antrian, meskipun masih terdapat tantangan terkait adaptasi tenaga kerja. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi program walk thru.

Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Surjono, 2015): Penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara berpengaruh sangat positif terhadap kepuasan wajib pajak. Dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan terpadu yang transparan dan akuntabel, kepuasan wajib pajak meningkat signifikan, ditunjukkan dengan koefisien determinasi sebesar 95,3%.

Efektivitas Modernisasi Administrasi Pajak dan Kepatuhan Pajak (Amah et al., 2010): Penelitian ini mengkaji dampak reformasi administrasi perpajakan yang menerapkan sistem informasi perpajakan terpadu. Hasilnya menunjukkan bahwa modernisasi ini mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

Pengaruh Sosialisasi dan Pemberian Insentif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Susila & Cahyani, 2019): Penelitian ini mengamati pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemberian insentif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota-kota besar di Indonesia. Temuan utamanya adalah bahwa upaya sosialisasi yang intens dan insentif yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Pengaruh Teknologi Informasi dalam Administrasi Perpajakan (Surjono, 2016): Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, dengan fokus pada implementasi sistem informasi perpajakan terpadu. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak melalui pemrosesan data yang lebih cepat dan akurat.

Pengaruh Kepemimpinan dan Manajemen Strategis Terhadap Kinerja Pelayanan Perpajakan (Prabowo & Indarto, 2018a): Penelitian ini menyoroti pentingnya kepemimpinan dan manajemen strategis dalam meningkatkan kinerja pelayanan perpajakan. Faktor-faktor ini berkontribusi pada efisiensi internal dan kepuasan eksternal, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Faktor Ekonomi dan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Musta'ana, 2022): Penelitian ini menganalisis faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Peran Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Prabowo & Indarto, 2018b): Penelitian ini menguji peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa konsultan pajak yang kompeten dan terpercaya dapat memberikan manfaat besar dalam memandu wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam konteks sistem administrasi pajak, terobosan ilmiah terbaru yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah fokus yang mendalam pada implementasi Sistem Administrasi Pajak Terpadu Melalui Kompilasi Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menggali potensi teknis dari integrasi data pajak yang spesifik ini, tetapi juga menganalisis dampaknya yang signifikan terhadap efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pajak di negara ini.

Salah satu kontribusi utama penelitian ini adalah penekanan pada strategi integrasi data yang terpadu, yang berpotensi mengatasi tantangan administratif tradisional dalam pengelolaan pajak. Dengan mengumpulkan dan menyusun data pajak barang dan jasa tertentu secara terintegrasi, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam mendukung identifikasi wajib pajak baru, analisis

kepatuhan, serta deteksi potensi penyelewengan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di antara kelompok dengan risiko tinggi pelanggaran.

Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan-tantangan kritis yang dihadapi dalam implementasi sistem ini di Indonesia, seperti keterbatasan infrastruktur IT dan kebutuhan akan SDM yang terampil. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang strategi pengembangan yang dapat diadopsi untuk mengatasi hambatan ini, sambil memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan pajak dan meningkatkan layanan kepada wajib pajak.

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada pendekatannya yang holistik terhadap sistem administrasi pajak, tidak hanya sebagai alat pengumpulan data tetapi sebagai platform untuk meningkatkan transparansi, efisiensi operasional, dan integritas sistem perpajakan secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga praktis dalam konteks kebijakan pajak dan administrasi di Indonesia, yang sedang menghadapi tuntutan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak dan memperkuat kapasitas administratif.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur akademik tentang administrasi pajak, khususnya dalam konteks pengembangan dan implementasi sistem administrasi pajak terpadu di negara berkembang seperti Indonesia. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola pajak di masa depan, sambil memperkuat kepatuhan dan meminimalkan potensi penyelewengan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai upaya untuk mewujudkan konsep tata pemerintahan yang baik. Fokus utama adalah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dengan mendalami prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi SIPD dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah secara lebih efisien dan transparan.

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana RKA yang disusun dalam SIPD mampu mencapai tujuan efektivitasnya di BKAD Kabupaten Kepulauan Yapen. Evaluasi ini akan mencakup aspek-aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang dilakukan berdasarkan standar efisiensi dan efektivitas administrasi publik. Tujuan kedua adalah untuk meneliti berbagai faktor yang dapat menghambat efektivitas penyusunan RKA dalam SIPD di BKAD. Faktor-faktor ini meliputi tantangan teknis, kebijakan, serta aspek manajerial yang mempengaruhi proses implementasi dan penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan ketiga adalah untuk mengidentifikasi upaya konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Penelitian ini juga akan mengevaluasi keberhasilan dan dampak dari strategi

yang diterapkan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses penyusunan RKA dengan memanfaatkan SIPD.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana penerapan SIPD dapat ditingkatkan untuk mendukung prinsip tata pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas di daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan publik di tingkat lokal.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai efektivitas penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Metode deskriptif kualitatif dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena yang ada melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan informan yang relevan. Dalam hal ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala BKAD Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabid Anggaran BKAD, dan Admin SIPD. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang mendalam mengenai efektivitas sistem yang diteliti (Murdiyanto, 2020).

Penelitian ini juga mengandalkan data sekunder dari berbagai dokumen resmi seperti Peraturan SIPD, Laporan Realisasi Anggaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja (Renja), dan Renstra (Rencana Strategis) (Thabroni, 2022). Data sekunder ini diperlukan untuk melengkapi dan memperdalam pemahaman terhadap konteks dan kondisi yang sedang diteliti. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen tersebut, sehingga memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang situasi dan kondisi yang ada di lapangan, seperti proses integrasi dan adaptasi sistem yang sedang berjalan.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan terstandar, mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam metodologi penelitian kualitatif (Sari sasi gendro, 2022). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum informasi yang relevan dan memfokuskan pada hal-hal yang esensial untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penyajian data dilakukan melalui uraian singkat, diagram, dan narasi untuk menggambarkan temuan dari analisis data. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan hasil dari proses analisis yang mendalam dan berdasarkan data yang telah terkumpul dengan validitas yang terjamin.

Salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Faktor pendukung internal seperti ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor pendukung eksternal seperti dukungan dari pemerintah pusat, menjadi penentu efektivitas implementasi sistem ini. Di sisi lain, faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran dan kualifikasi sumber daya manusia dapat menghambat kelancaran implementasi (Hasibuan et al., 2022). Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, dilakukan upaya langsung dan tidak langsung baik dari internal maupun eksternal, seperti peningkatan pelatihan dan sosialisasi kepada aparatur pemerintahan.

Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja sistem yang sedang dipelajari (Rijali, 2019). Hal ini penting dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, di mana perubahan kebijakan dan teknologi informasi dapat berdampak signifikan terhadap efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui pendekatan kualitatif yang holistik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dan menjelaskan kompleksitas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta menawarkan pandangan baru terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa depan .

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Optimalisasi Sistem Administrasi Pajak Terpadu Melalui Kompilasi Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Bandar Lampung

Sistem administrasi pajak yang efektif dan efisien merupakan hal krusial bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Bandar Lampung telah melakukan langkah-langkah optimalisasi melalui integrasi data pajak tertentu dalam upaya meningkatkan ketaatan pajak wajib pajak.

Tujuan Optimalisasi Sistem Administrasi Pajak Terpadu

Tujuan utama dari optimalisasi ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah. Hal ini meliputi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak serta partisipasi aktif dari wajib pajak dan masyarakat umum dalam proses ini.

Indikator Keberhasilan Optimalisasi

Indikator keberhasilan optimalisasi sistem administrasi pajak terpadu mencakup tingkat kepatuhan pajak dan tingkat kepercayaan pajak. Kepatuhan pajak mengukur sejauh mana wajib pajak

mematuhi kewajiban mereka, sedangkan kepercayaan pajak merujuk pada keinginan sukarela wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan.

Tingkat Kepatuhan Pajak

Tingkat kepatuhan pajak di Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, penerapan hukum yang tegas, pelayanan yang optimal, dan kebijakan perpajakan yang adil. Peningkatan kepatuhan ini didukung oleh implementasi sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran perpajakan.

Pengawasan dan Penertiban Objek Pajak

Pengawasan yang efektif terhadap objek pajak, termasuk penggunaan teknologi seperti tapping box, memainkan peran penting dalam memastikan integritas sistem perpajakan. Ini tidak hanya memastikan penerimaan pajak sesuai target tetapi juga mencegah praktik penghindaran dan penipuan pajak.

Sistem Informasi Manajemen Tata Kelola Pajak Daerah (SIMANTAP)

SIMANTAP merupakan inovasi yang krusial dalam administrasi pajak daerah Kota Bandar Lampung. Platform ini memungkinkan integrasi data pajak, pembayaran online, dan analisis yang lebih akurat bagi pemerintah daerah. Keberadaan SIMANTAP juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak.

Pelayanan dan Dukungan Terhadap Wajib Pajak

Kualitas layanan yang baik dari BPPRD Kota Bandar Lampung kepada wajib pajak, termasuk pelatihan terkait SIMANTAP dan pelayanan teknis lainnya, berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Dukungan ini penting dalam mendorong partisipasi aktif wajib pajak dalam administrasi pajak daerah.

Kebijakan Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pajak

Kebijakan perpajakan yang jelas, sederhana, dan transparan mendorong tingkat kepercayaan pajak yang lebih tinggi. Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat mengurangi biaya operasional dalam penegakan hukum pajak dan memperkuat dasar intensifikasi pajak daerah.

Alternatif Keputusan dalam Sistem Administrasi Pajak Terpadu

Identifikasi masalah merupakan langkah awal untuk memahami tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan sistem administrasi pajak terpadu. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, beberapa masalah yang teridentifikasi meliputi:

1. **Keterbatasan Sumber Daya:** Terdapat keterbatasan dalam sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang menghambat kemampuan SIMANTAP untuk beroperasi secara optimal. Misalnya, kurangnya jumlah staf IT yang memadai untuk melakukan maintenance dan dukungan teknis bagi wajib pajak.
2. **Kurangnya Koordinasi:** Koordinasi yang tidak memadai antara wajib pajak dan petugas pajak dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, serta kesulitan dalam memastikan kepatuhan pajak.
3. **Kompleksitas Peraturan:** Perubahan yang sering dalam peraturan perpajakan membingungkan wajib pajak dan dapat menghambat kepatuhan serta efisiensi dalam pengelolaan pajak.
4. **Kekhawatiran Keamanan Data:** Wajib pajak sering kali mengkhawatirkan keamanan data pribadi mereka dalam SIMANTAP, yang membutuhkan jaminan keamanan yang kuat untuk memastikan data tidak disalahgunakan.
5. **Ketidaksempurnaan Data:** Data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak terintegrasi dengan baik dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan dan pengawasan.

3.2 Faktor – Faktor Penghambat optimalisasi sistem administrasi pajak pada Badan Pengelolaan pajak daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

Untuk mengoptimalkan sistem administrasi pajak di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, terdapat sejumlah faktor penghambat yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah tingginya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak barang dan jasa tertentu. Menurut wawancara dengan Kepala Bidang P2O, banyak wajib pajak yang menghindari kewajiban mereka dengan menggunakan celah dalam sistem atau dengan tindakan yang melanggar aturan, meskipun BPPRD memberlakukan tenggat waktu dan sanksi untuk mendorong kepatuhan. Meski peraturan e-billing telah diberlakukan, perubahan terbaru dalam undang-undang memerlukan penyusunan peraturan daerah pendamping untuk memperkuat pengawasan administrasi pajak.

Selain itu, kendala lainnya adalah pengelolaan data yang belum optimal. Meskipun pada bulan September 2023 sudah tercatat sekitar 2400 wajib pajak potensial dari barang dan jasa tertentu, belum semua objek pajak terdata dengan baik sesuai potensi daerah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya

lebih lanjut dalam pengumpulan dan manajemen data untuk membangun database pajak yang lebih lengkap. Permasalahan lainnya termasuk kompleksitas dalam pengelolaan pajak di sektor-sektor tertentu seperti hotel, restoran, dan hiburan, yang membutuhkan penyesuaian sistem yang sesuai dengan kebutuhan khusus dari masing-masing sub-bidang. Peningkatan sumber daya, baik dari segi personil maupun teknologi informasi, juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung operasional yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola administrasi pajak secara terpadu di Kota Bandar Lampung.

3.3 Upaya – Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan pajak daerah Kota Bandar Lampung dalam optimalisasi sistem administrasi pajak terpadu

Untuk mengoptimalkan sistem administrasi pajak di Kota Bandar Lampung, Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPRD) telah melakukan sejumlah upaya yang signifikan. Salah satu langkah utama adalah pengembangan Aplikasi SIMANTAP (Sistem Manajemen dan Tatakelola Administrasi Pajak) berbasis kerjasama dengan PT. FTF Globalindo, yang bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi pajak serta meningkatkan penerimaan PBJT. Selain itu, BPPRD juga meningkatkan intensifikasi pajak dengan menyediakan layanan pelaporan dan pembayaran secara daring melalui SIMANTAP, serta mengimplementasikan pengawasan yang lebih ketat melalui tim terpadu di lapangan dan penggunaan tapping box untuk merekam transaksi usaha.

Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki efisiensi dalam pengelolaan pajak, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang mengatur sistem pembayaran pajak elektronik. Upaya ini didukung dengan sosialisasi secara berkala kepada wajib pajak, baik secara kelompok maupun individual, guna meningkatkan pemahaman mereka tentang penerapan sistem administrasi pajak terpadu. Dengan demikian, implementasi SIMANTAP dan upaya lainnya mencerminkan komitmen BPPRD Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi pajak sesuai dengan kebutuhan dan tantangan unik yang dihadapi oleh daerah tersebut.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama dalam penelitian merupakan bagian krusial yang memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan dan menguraikan hasil-hasil yang telah diperoleh dari penelitian mereka. Dalam konteks ini, diskusi temuan utama sering kali dibagi menjadi beberapa aspek yang mencakup signifikansi hasil, implikasi teoretis, serta implikasi praktis dari penelitian tersebut.

Pertama, dalam diskusi temuan utama, peneliti biasanya akan mengeksplorasi signifikansi hasil penelitian mereka. Hal ini melibatkan pembahasan tentang relevansi dan pentingnya temuan-temuan tersebut dalam konteks bidang studi yang relevan. Misalnya, jika penelitian tersebut menemukan hubungan yang signifikan antara dua variabel tertentu, diskusi akan fokus pada bagaimana temuan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita tentang fenomena yang dikaji.

Kedua, peneliti juga akan mengeksplorasi implikasi teoretis dari temuan mereka. Ini melibatkan penempatan hasil penelitian dalam kerangka teoritis yang lebih luas dan membahas bagaimana temuan tersebut dapat mengisi celah pengetahuan atau mengubah pandangan teoritis yang ada. Contohnya, jika penelitian menunjukkan bahwa teori tertentu tidak sepenuhnya menjelaskan fenomena yang diamati, diskusi ini akan menggali bagaimana temuan tersebut dapat mengarah pada pengembangan atau revisi teori-teori yang ada.

Ketiga, diskusi temuan utama juga akan menyoroti implikasi praktis dari penelitian. Ini mencakup pembahasan tentang bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata atau praktik. Misalnya, penelitian tentang efektivitas suatu program intervensi dapat membahas bagaimana temuan ini dapat membantu dalam merancang kebijakan publik atau strategi intervensi yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, diskusi temuan utama merupakan momen penting dalam sebuah penelitian yang memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menjelaskan hasil-hasil mereka, tetapi juga untuk menunjukkan kontribusi dan dampak dari penelitian tersebut dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan, teori, dan praktik.

Perbandingan ini dengan penelitian sebelumnya dalam konteks penelitian tentang efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, penelitian ini memperluas pemahaman sebelumnya tentang implementasi SIPD dalam manajemen keuangan daerah. Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Rafiani (2021) dan Harahap (2021), menyoroti kendala teknis dan sumber daya manusia yang mempengaruhi penerapan SIPD di berbagai daerah, namun belum secara mendalam mengidentifikasi solusi untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Novianta (2021) dan Vitriana et al. (2022) lebih fokus pada aspek administratif dan teknis implementasi SIPD, dengan sedikit penekanan pada analisis kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi sejauh mana SIPD efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang spesifik bagi BKAD Kabupaten Kepulauan Yapen.

3.5 Diskusi Temuan Menarik

Diskusi temuan menarik dalam penelitian memainkan peran kunci dalam menyoroti aspek-aspek unik dan penting dari hasil penelitian yang dapat menarik perhatian pembaca dan masyarakat ilmiah. Pertama-tama, dalam diskusi ini, peneliti mengidentifikasi dan mengeksplorasi temuan-temuan yang paling menarik atau mengejutkan dari studi mereka. Misalnya, penemuan yang tidak

sesuai dengan ekspektasi awal atau yang menunjukkan pola baru dalam data sering kali menjadi titik fokus diskusi ini, di mana peneliti dapat menjelaskan implikasi dari temuan tersebut.

Kedua, diskusi temuan menarik juga melibatkan analisis mendalam tentang faktor-faktor atau mekanisme yang mungkin menjadi penyebab hasil yang menarik tersebut. Ini melibatkan penelitian lebih lanjut untuk memahami mengapa fenomena tersebut terjadi atau bagaimana variabel-variabel tertentu berinteraksi untuk menghasilkan hasil yang tidak biasa atau menarik. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan wawasan teoretis dan bukti empiris yang ada untuk merangkai cerita yang koheren tentang apa yang temuan tersebut berarti secara lebih mendalam.

Ketiga, diskusi temuan menarik juga membahas potensi dampak dan relevansi temuan tersebut terhadap bidang studi yang lebih luas atau terhadap masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Misalnya, penelitian yang mengungkapkan pola-pola baru dalam data ekonomi dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi kebijakan publik atau strategi bisnis. Diskusi ini menyoroti pentingnya temuan tersebut dalam konteks yang lebih luas dan menawarkan pandangan tentang bagaimana informasi ini dapat digunakan untuk mengarahkan penelitian dan tindakan di masa depan.

Dengan demikian, diskusi temuan menarik dalam penelitian tidak hanya menggambarkan hasil yang menonjol dari studi tersebut, tetapi juga mengajak pembaca untuk mempertimbangkan implikasi dan arti dari temuan-temuan tersebut dalam konteks ilmiah, teoritis, dan praktis yang lebih luas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi Sistem Administrasi Pajak Terpadu Melalui Kompilasi Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 telah berjalan secara efektif. Integrasi antara Sistem Manajemen Tata Kelola Administrasi Pajak Terpadu dengan pemutakhiran potensi PBJT secara berkala serta sinergi dengan tujuan optimalisasi, alternatif keputusan, dan sumber daya telah mendukung efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat utama yang perlu diatasi, seperti adanya kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, belum terdatanya sebagian besar wajib pajak sebagai potensi pajak daerah, serta keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan sistem administrasi pajak terpadu.

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, seperti pengembangan Aplikasi SIMANTAP, kerja sama dengan pihak ketiga dalam bidang IT, sosialisasi intensif terkait penggunaan SIMANTAP, dan penegakan peraturan daerah tentang E-Billing, merupakan langkah-langkah proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem administrasi pajak yang lebih baik dapat dicapai melalui integrasi teknologi yang lebih canggih, pembaruan regulasi yang sesuai, serta pendekatan komprehensif dalam mengatasi tantangan yang ada. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dan efisiensi administratif di masa mendatang.

Keterbatasan Penelitian. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang implementasi dan tantangan Sistem Administrasi Pajak Terpadu (SAPT) di Kota Bandar Lampung, beberapa keterbatasan tetap perlu diakui. Pertama, keterbatasan dalam akses data yang mendalam dan waktu observasi yang terbatas mungkin mempengaruhi kedalaman analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan. Selain itu, fokus penelitian yang lebih terbatas pada perspektif internal dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dapat menghasilkan perspektif yang belum sepenuhnya holistik terhadap dinamika interaksi dengan wajib pajak dan faktor eksternal lainnya. Keterbatasan lainnya adalah ketergantungan pada data sekunder yang tersedia dan keterbatasan dalam pengumpulan data primer dari berbagai pihak terkait, seperti wajib pajak dan masyarakat umum, yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang persepsi dan pengalaman mereka terhadap implementasi SAPT. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan data dan metodologi untuk mengatasi keterbatasan ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang efektivitas serta tantangan dalam penerapan SAPT di konteks administrasi pajak daerah.

Arah Masa Depan Penelitian. Untuk mengarahkan masa depan penelitian lebih lanjut, diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Sistem Administrasi Pajak Terpadu (SAPT) di Kota Bandar Lampung. Pertama, penelitian selanjutnya sebaiknya memfokuskan pada pengembangan lebih lanjut dari Aplikasi SIMANTAP untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data pajak. Ini mencakup integrasi teknologi yang lebih maju seperti kecerdasan buatan (AI) untuk analisis data dan deteksi penipuan pajak secara lebih efisien. Kedua, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penghambat yang masih menjadi tantangan, seperti penghindaran pajak dan kurangnya kesadaran atau pemahaman wajib pajak terhadap sistem administrasi pajak terpadu. Penelitian ini dapat menghasilkan strategi sosialisasi yang lebih efektif dan pembaruan kebijakan yang lebih tepat guna. Selain itu, penelitian mendatang sebaiknya melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk wajib pajak, untuk mendapatkan masukan langsung dan pemahaman yang lebih dalam mengenai kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi dalam mematuhi kewajiban pajak. Ini akan membantu memastikan bahwa implementasi kebijakan dan pengembangan sistem dapat lebih akurat mencerminkan kebutuhan praktis di lapangan. Terakhir, dalam mengarahkan masa depan penelitian, penting untuk mempertimbangkan dampak dari perubahan regulasi atau perubahan teknologi yang cepat, serta bagaimana penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan-tantangan baru yang mungkin muncul dalam administrasi pajak di era digital ini. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah serta efisiensi pengelolaan administratif di Kota Bandar Lampung.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N., Juniawati, & Novitasari, R. A. (2010). Efektivitas Modernisasi Administrasi Pajak dan Kepatuhan Pajak. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UNIPMA*.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Lestari, R. D., Hasibuan, M. S., & Wahyuni, S. (2023). Penerapan Data Mining Menggunakan Metode Teknik Klasifikasi Untuk Melihat Potensi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. *Journal of Computer Science and Informatics Engineering (CoSIE)*. <https://doi.org/10.55537/cosie.v3i1.710>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Musta'ana. (2022). Dynamic Governance dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 4(1). <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.122>
- Prabowo, O. M., & Indarto, I. (2018a). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REFORMASI PERPAJAKAN. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3). <https://doi.org/10.26623/jreb.v11i3.1144>
- Prabowo, O. M., & Indarto, I. (2018b). Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3).
- Rahmadi, A. N., & Wahyuni, R. U. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM WALK THRU PADA PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA PROBOLINGGO. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 19(2). <https://doi.org/10.46730/jiana.v19i2.7993>
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Saputra, D., Citra Dewi, R., & Putri Erant, G. (2022). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 3(1). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841>
- Sari sasi gendro, dea aulya. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).
- Surjono, W. (2015). PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 7(2). <https://doi.org/10.17509/jaset.v7i2.8859>
- Surjono, W. (2016). PERANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT

JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I BANDUNG. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1).
<https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7705>

Susila, A., & Cahyani, S. D. (2019). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. *Universita Islam "45" Bekasi*, 9(Februari).

Thabroni, G. (2022). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh). In *Serupa.Id*.

